## Jadi Pj Gubernur Saja Susah, Heru Budi Ogah Ikut Pilgub 2024

**JAKARTA (IM)** - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku tugas yang kini harus dijalaninya terasa berat. Heru Budi dilantik menjadi Pj Gubernur pada 17 Oktober 2021, sehari usai Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria purnatugas sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Heru mulanya mengaku tak terbebani karena hanya mengisi kekosongan jabatan. "Saya tidak ada beban dan namanya penjabat, ini adalah pejabat sementara, mengisi kekosongan," tutur Heru dalam sambutan saat kegiatan Koordinasi Pencegahan Korupsi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (15/12).

Ia lalu menyinggung pertemuannya dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata. Alexander disebut bertanya kepada Heru apakah hendak maju sebagai gubernur DKI Jakarta pada 2024.

Namun, kata Heru, menjadi seorang Pj Gubernur DKI Jakarta saja sudah tergolong berat. Karena itu, Heru mengaku bakal menyerahkan jabatan Gubernur DKI Jakarta kepada mereka yang memang ingin mencalonkan diri. "Dan tadi Bapak tanya maju apa tidak. Jadi penjabat gubernur aja sudah susah, berat. Itu, nanti 2024, serahkan kepada yang kepengin saja," kata Heru sembari bergurau.

Heru mengaku akan melaksanakan tugas sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta hingga batas waktu yang ditentukan.

"Dan saya melaksanakan tugas ini sampai selesai, sebagaimana amanat. Saya kemarin (saat) pelantikan ada kalimatnya begini katanya, Pak, 'selama, paling lama satu tahun atau dapat diperpanjang'," kata dia.

Untuk diketahui, Heru yang juga masih menjabat Kepala Sekretariat Presiden RI ditunjuk sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo. Heru terpilih dari tiga kandidat, dua kandidat lainnya yaitu Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar serta Sekretaris Daerah DKI Jakarta saat itu, Marullah Matalli.

Dengan penunjukan itu, Heru bakal menjabat sekitar dua tahun, hingga pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI berlangsung pada November 2024, serentak dengan daerah lain. ● **yan**

## Turap Antibanjir Mulai Dipasang di Kali Angke Kembangan Utara Jakbar

**JAKARTA (IM)** - Juli lalu, permukiman di dekat Kali Angke kawasan Kembangan Utara Jakarta Barat ini kebanjiran. Warga setempat berharap pemerintah membangun turap untuk mengatasi masalah banjir akibat kali meluap. Kini, turap mulai dipancangkan di sisi-sisi kali ini.

"Pembangunan sudah berjalan," kata Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat, Purwanti Suryandari, Kamis (15/12).

Lurah Kembangan Utara, Rudi Hariyanto, menyatakan pembangunan memang masih berjalan di kali yang berkelok itu. Dia mengetahui, turap direncanakan Dinas SDA untuk dipasang di pinggir kali sepanjang 26 meter. Namun kini, bagian yang terpasang sheet pile baru sebagian kecil.

"Sudah 8 meter," kata Rudi Hariyanto.

Lokasi kawasan ruas Kali Angke dekat permukiman rawan banjir ini ada di RT 7 RW 1. Turap itu perlu dibangun untuk menanggulangi luapan Kali Angke ke kawasan permukiman.

Pada pertengahan Juli kemarin, permukiman di sekitar kali ini terendam banjir, warga ingin agar turap segera dibangun. ● **yan**

## Dinas LH DKI Siapkan Strategi Ringankan Aturan Batas Usia Maksimal PJLP

**JAKARTA (IM)** - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyiapkan strategi untuk menyikapi aturan batas usia pegawai Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP). Aturan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1095 Tahun 2022, yang mengatur batas usia PJLP maksimal 56 tahun.

"Kami sudah memiliki siasat untuk memngadakan keringanan, agar PJLP masih dapat terus bekerja di Dinas LH," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Balai Kota Jakarta, Kamis (15/12).

Strategi itu berupa rencana tetap mempekerjakan PJLP yang memiliki kinerja bagus meski berusia 56 tahun ke atas.

"Kami punya rapor kinerja masing-masing PJLP. Itu menjadi pertimbangan kami, untuk melanjutkan atau tidak PJLP, agar dapat terus bekerja di Dinas LH," ungkap Asep.

Selain itu, DLH juga berencana memberikan keringanan kepada PJLP yang menghidupi keluarga dengan anak yang masih kecil. "Kami juga kemungkinan masih akan mempekerjakan PJLP yang punya anak yang masih kecil, misalnya," kata Asep.

Kendati demikian, keringanan-keringanan itu masih berupa wacana yang akan disampaikan dalam rapat hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saat ini sedang menggelar rapat daring berkait aturan batas maksimal usia pegawai PJLP.

"Berkait hal itu, hari ini sedang kami rapatkan di tingkat pemprov. Rapat antara seluruh sekdis dan Kasubag Kepegawaian," kata Asep.

Asep berharap rapat tersebut akan menghasilkan kebijakan baru, sehingga ratusan anak buahnya tidak terdampak. "Mudah-mudahan ada kebijakan baru dari Pemprov DKI. Tapi kembali lagi, apapun kebijakan pemprov akan kami terapkan," pungkas dia.

Kebijakan baru diharapkannya, sebab, aturan itu bisa menimbulkan keresahan. Ia mengatakan, dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta saja, terdapat sekitar 600 orang yang akan terdampak jika aturan itu diterapkan.

"Jumlah PJLP di atas usai 56 tahun di Dinas LH sendiri paling tidak ada 500 sampai 600 orang. Jadi luar biasa jumlahnya, mungkin menimbulkan keresahaan," kata Asep. ● **yan**


**PENGUMUMAN**

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1b UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dengan ini kami mengumumkan tidak terdapat pembagian sisa aset hasil proses likuidasi PT. TRI MEGAH BAHARI (dalam likuidasi)–"Perseroan" berkedudukan di Tangerang Selatan, dikarenakan berdasarkan neraca likuidasi akhir Perseroan (dalam likuidasi) adalah Nihil.

Tangerang, 16 Desember 2022

PT. TRI MEGAH BAHARI (dalam likuidasi)

Ttd. Likuidator



**PENGUMUMAN**

Berdasarkan KESEPAKATAN BERSAMA PARA PEMEGANG SAHAM (Sebagai Pengganti RUPS-LB) PT MANDIRI LINTAS PRATAMA, Berkedudukan di Jakarta Barat, yang telah dituangkan akta yang dibuat dihadapan MOHAMMAD FAHROJI, S.H.,M.Kn. Notaris di Kota Sukabumi, tertanggal 21-05-2021, Nomor 48, telah diambil keputusan untuk menurunkan Modal Setor dari sebesar Rp.4.210.000.000,- menjadi sebesar Rp.2.500.000.000,- menunjuk kepada pasal 44 (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka bagi para yang berkepentingan/para Kreditur dan mempunyai keberatan atas hal tersebut, harap mengajukan keberatan secara tertulis dengan bukti pendukung yang sah paling lambat 60 hari terhitung dari tanggal pengumuman ini kepada :

**PT MANDIRI LINTAS PRATAMA**
Pergudangan Duta Indah Karya Blok B26
Jalan Raya Daan Mogot KM 13,
Rawa Buaya, Cengkareng,
Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Jakarta, 16 Desember 2022

**Direksi PT MANDIRI LINTAS PRATAMA**


FOTO/ANT

**KREASI POHON NATAL DARI SERIBU BUKU ENTREPRENEUR**

Sejumlah mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya menyusun buku entrepreneur untuk pembuatan pohon Natal di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (15/12). Kreasi pohon Natal setinggi lima meter yang dibuat dari seribu buku entrepreneur tersebut guna memeriahkan perayaan Natal 2022 sekaligus mengenalkan buku-buku tentang kewirausahaan.

# KPK Sindir Pejabat Pemprov DKI Punya Tanah Berpuluh Bidang

Kami masih sering mendengar dan mendapat informasi masih ada pejabat Pemprov DKI yang berupaya untuk mendapat penghasilan tambahan terutama dalam proses PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa), kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

**JAKARTA (IM)** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan ada oknum pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih berusaha mencari uang tambahan dari proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Namun, tidak disebutkan siapa oknum dimaksud.

"Kami masih sering mendengar dan mendapat informasi masih ada yang berupaya untuk mendapat penghasilan tambahan terutama dalam proses PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa)," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Balai Kota Jakarta, Kamis (15.12).

Marwata pun menyayangkan tindakan tersebut karena penghasilan pejabat DKI salah satunya setingkat kepala dinas yang tergolong tinggi dan di atas rata-rata daerah lain.

"Tingkat kesejahteraan, tingkat penghasilan jauh di atas rata-rata, bahkan ada salah satu dirjen di kementerian iri dengan penghasilan kepala dinas di Pemprov DKI," ucapnya.

Ia pun mendorong Inspektorat DKI Jakarta menjadikan temuan tersebut sebagai perhatian khusus dan dilakukan pemeriksaan karena proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan menjadi salah satu titik rawan kebocoran anggaran.

"Titik paling rawan kebocoran anggaran itu terkait pengadaan barang dan jasa juga menyangkut perizinan di Pemprov DKI," katanya.

Bahkan, Alexander yang memiliki akses membuka Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) baik pusat dan daerah termasuk di Pemprov DKI, menyebutkan ada pejabat yang memiliki aset berupa puluhan bidang tanah, yakni 20-25 bidang tanah.

Ia pun mempertanyakan kewajaran pejabat memiliki tanah yang banyak tersebut. "Ini banyak saya lihat pejabat Pemprov DKI punya tanah berpuluh bidang, saya tidak tahu. Ini mudah-mudahan itu juga dari hasil yang halal," tutur Alexander.

Untuk itu, KPK menempatkan tiga orang satgas untuk mengawasi pengelolaan APBD dan BUMD DKI.

Selain atas permintaan Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, penambahan satgas itu juga mencermati APBD Pemprov DKI yang tergolong besar yakni Rp80 triliun lebih per tahun yang setara APBD seluruh provinsi di Pulau Sumatera.

Sementara itu, Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono mengatakan terkait LHKPN di DKI Jakarta, para pejabatnya sudah rutin melaporkan harta kekayaannya. Ia pun meyakini pejabat di DKI sudah melaporkan harta kekayaannya melalui inspektorat.

"Saya rasa melalui inspektorat semuanya sudah (melapor), termasuk saya dari tahun 2000 atau 2002 saya selalu melaporkan LHKPN dan terakhir juga setiap tahun laporan. Nanti laporannya Januari, Februari, untuk posisi 2022. Saya rasa (pejabat) DKI semua sudah melapor," ungkap Heru. ● **yan**

## Sepanjang 2022, Damkar Kota Bekasi Catat 134 Kasus Jari Terjepit Cincin

**BEKASI (IM)** - Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Bekasi mencatat 134 kasus warga yang meminta pertolongan untuk melepaskan cincin dari jarinya.

Kasie Komunikasi dan Investigasi Damkar Kota Bekasi, Heri Kurnianto menuturkan, kebanyakan dari mereka meminta pertolongan karena terjepit cincin yang sudah tidak muat di jari.

"Perkiraannya, yang meminta karena tidak sengaja memakai itu sekitar 30 persen, sedangkan 70 persennya karena cincin yang memang sudah tidak muat," ujar Heri saat dihubungi awak media, Kamis (15/12).

Masyarakat yang meminta pertolongan itu datang ke Mako Damkar atau ke Pos Sektor Damkar. Beragam jenis cincin berhasil dilepas dari jari warga yang membutuhkan pertolongan tim Damkar Kota Bekasi. Mulai dari cincin almunium hingga emas. Kendati demikian, petugas damkar juga kerap dihadapkan sejumlah tantangan untuk melepaskan cincin dari jari warga. Mereka perlu berhati-hati agar jari tidak terluka saat cincin dipotong dengan gerinda.

"Kalau logam atau platinum agak susah karena membutuhkan mata gerinda berdasarkan ketebalan cincin," ucap Heri. "Kemudian juga membutuhkan kehati-hatian yang cukup ekstra dan memakan waktu karena kami akan memastikan apakah dia (warga yang memerlukan pertolongan) merasa sakit atau tidak," sambung Heri. ● **yan**

## Pemkab Raih Penghargaan Gubernur Jabar atas Kesungguhannya Tekan Angka Stunting

**BANDUNG (IM)** - Beragam upaya dan program telah dilakukan dalam menekan angka prevalensi stunting, keberhasilan tersebut membawa Pemerintah Kabupaten Bekasi menerima penghargaan dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kategori Daerah Kabupaten/Kota Komitmen di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

FOTO : DOK.PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (dua kiri) memberikan penghargaan kepada Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (kanan) dalam event akbar "Jabar Stunting Summit 2022 di Aula Gedung Sate, Bandung, Rabu (14/12).

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, kepada Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, dalam event akbar "Jabar Stunting Summit 2022" di Aula Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (14/12).

"Kabupaten Bekasi mendapat penghargaan karena menunjukkan komitmen seriusnya, dalam upaya penanggulangan stunting baik sifatnya pencegahan untuk anak remaja, ibu hamil dan penanggulangan untuk anak yang terlahir dalam kondisi stunting," ujar Dani Ramdan.

Disampaikan bahwa pada 76 desa yang menjadi target utama penurunan stunting, Kabupaten Bekasi menargetkan di angka 7 persen dalam memperbaiki kondisi ekonomi dan gizinya.

"Sebelumnya ada kondisi unik di mana hampir tiap tahun berganti Bupati jadi ada beberapa program dari TPPS terhambat, memang saat ini belum mencapai target namun di tahun ini minimal 4 poin dulu tercapai, kemudian mengejar ketertinggalan 3 poin lagi semoga 7 persen ini bisa dicapai," katanya.

Dirinya menyebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh Kabupaten Bekasi sesuai dengan 8 aksi konvergensi penurunan stunting, antara lain regulasi, sarana prasarana, edukasi, dan pemberian obat-obatan.

"Ada 8 area konvergensi yang sudah dilakukan nah dari 8 tersebut melibatkan hampir seluruh OPD dan juga CSR dari Cikarang Listrindo, ini artinya membuktikan kolaborasi pentahelix mulai berjalan baik," tuturnya.

Pihaknya mengatakan akan memperkuat sistem informasi agar setiap pelaksanaannya dapat tercatat dan terarahkan, seperti dengan adanya Sub Informasi Digital dan Terpadu agar langkah-langkah yang akan dilakukan kedepan dapat tepat sasaran.

"Kita perkuat sistem informasi agar upaya-upaya yang sudah dilakukan bisa tercatat dan terarahkan untuk nantinya bisa tepat sasaran." katanya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Kamis (15/12).

Menteri Kesehatan RI, Budi Gumadi Sadikin menegaskan penanganan stunting perlu diukur dan ditangani secara serius.

Penurunan tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

"Setiap tahun Menkes akan laporkan grafik penurunan stunting di setiap daerah dan tetap perlu ada penanganan serius. Kita semua bisa melakukan penurunan stunting salah satunya melalui intervensi gizi spesifik dengan pemberian makanan pada ibu hamil itu hal utama." tutupnya.

Menurut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, persoalan kasus stunting bukan hanya urusan Dinas Kesehatan, tetapi seluruh stakeholder ikut serta bertanggungjawab menyampaikan komitmennya.

Dirinya berharap inovasi dan strategi yang dilakukan bersama ini mampu menjadikan Jabar Zero Stunting di tahun berikutnya.

"Kami di Jawa Barat sepakat bahwa stunting bukan hanya urusan Dinas Kesehatan, tapi semua dinas OPD ikut berkomitmen dan bertanggungjawab menangani stunting ini. Maka kami juga berikan penghargaan kepada daerah-daerah dengan berbagai kategori," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Hasto Wardoyo, menyampaikan rasa terimakasih kepada Bupati/Walikota se-Jawa Barat atas raihan prestasi yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain di luar Jawa Barat.

"Kami apresiasi dan terimakasih kepada seluruh perangkat daerah karena telah membuktikan prestasinya dalam menangani stunting. Bukan perkara mudah, ini berkenaan dengan tanggungjawab." katanya. ● **mdl**


**PEMBERITAHUAN HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI**

Dengan ini diumumkan bahwa proses likuidasi PT MEGA PRATAMA SERASI (dalam likuidasi) berkedudukan di Depok telah berakhir dan para pemegang saham telah menerima pertanggungjawaban Likuidator serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Likuidator, sebagaimana diuraikan dalam akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT MEGA PRATAMA SERASI (dalam likuidasi) tanggal 15 Desember 2022 nomor 46, dibuat dihadapan SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.

Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat 3 UUPT nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Depok, 16 Desember 2022
Likuidator
PT MEGA PRATAMA SERASI
(dalam Likuidasi)



**PEMBERITAHUAN HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI**

Dengan ini diumumkan bahwa proses likuidasi PT SENTRA TATA PRIMA (dalam likuidasi) berkedudukan di SURABAYA telah berakhir dan para pemegang saham telah menerima pertanggungjawaban Likuidator serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Likuidator, sebagaimana diuraikan dalam akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT SENTRA TATA PRIMA (dalam likuidasi) tanggal 15 Desember 2022 nomor 48, dibuat dihadapan SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.

Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat 3 UUPT nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Surabaya, 16 Desember 2022
Likuidator
PT SENTRA TATA PRIMA
(dalam Likuidasi)